

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

¹³ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas : ¹⁴

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebisama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Menurut N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan

¹³Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hal.2.
<http://digilib.unila.ac.id>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018

¹⁴ *Ibid.*

larangan perundang-undangan (dalam arti luas), sedangkan izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tujuan tertentu atau menghalangi keadaan buruk.¹⁵

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan..¹⁶

Dalam hal perizinan, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting terhadap segala bentuk kegiatan usaha baik yang diizinkan maupun tidak diizinkan yang dilakukan oleh setiap orang atau pihak yang bersangkutan. Setiap warga negara yang akan melakukan suatu kegiatan usaha harus memiliki izin baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun klasifikasi bentuk-bentuk perizinan dalam usaha perdagangan meliputi antara lain perizinan di sektor pemerintahan umum

¹⁵Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cet. II Sinar Grafika, Jakarta, hal.168. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018

¹⁶Bersumber dari *Negara Hukum. Pengertian Perizinan*. <http://www.negarahukum.com>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018

sektor agraria/pertanahan, sektor perindustrian, sektor usaha/perdagangan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor sosial, dan sektor-sektor lainnya.¹⁷

2. Unsur Perizinan

Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya :

a. Instrumen yuridis

Dalam Negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.¹⁸

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan

¹⁷ Rahayu Hartini, 2005, *Hukum Komersial*, Malang, UMM Press, Hal. 667

¹⁸ *Op.cit. hal.3*

tersebut, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu lranan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Pada umumnya sistem izin terdiri dari :¹⁹

- 1) Larangan
 - 2) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian
 - 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin
- b. Peraturan perundang-undangan
- Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum

Maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena

¹⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hal. 17-18. <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018

tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

- d. Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di capai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. Biasanya dalam sistem perizinan

dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.

- e. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu Orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.

- f. Prosedur dan persyaratan perizinan

Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dpat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan

persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut.²⁰

1. Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

2. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau

²⁰ Dikutip dari *Sudut Hukum. Aspek Yuridis dan Unsur-Unsur Perizinan*. <https://www.suduthukum.com>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018

surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.

- a. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- b. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

- c. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.
- 4) Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal

mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Disebutkan dengan jelas.
- b. Mengikuti standar nasional.
- c. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- d. Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.
- e. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

1.1 Fungsi Perizinan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.²¹

Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap sebagai ujung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai:

- a. Pengarah Keinginan megarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
- b. Perekayasa Kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau yang sering disebut pembuatan izin.

²¹ Kampus Hukum. Fungsi dan Tujuan Perizinan Hukum Administrasi. <http://kampushukum.com>. Diakses tanggal 28 Oktober 2018

- c. Perancang masyarakat yang adil dan makmur Sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan sarana.
- d. Pengendali Kegiatan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai apa yang direncanakan.
- e. Penertib masyarakat Izin dimaksudkan juga sebagai suatu penertib masyarakat.²²

1.2 Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan peristiwa konkrit yang dihadapi. Secara umum, tujuan izin adalah:

- a. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan rank en horecawet, dimana pengurus harus mempunyai syarat-syarat tertentu).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan Memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, bareang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

²² Hestanto. Fungsi Hukum dan Tujuan Perizinan. <https://www.hestanto.web.id>. Diakses tanggal 28 Oktober 2018

- c. Melindungi objek-objek tertentu Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perusakan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki izin resmi.
- d. Membagi objek-objek yang sedikit Memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan suatu objek untuk kegiatan dimaksud.

Bentuk dan isi dari izin harus mengandung unsur kepastian hukum. Penerbitan suatu izin harus tertulis dan secara umum memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Organ yang berwenang Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ kewenangan dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan dan hampir selalu yang terkait adalah organ Pemerintahan.
- b. Adresat harus lengkap Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin dikeluarkan setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, sehingga keputusan yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang memohon izin.
- c. Diktum (substansi dari izin harus dimuat dalam diktum) Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Diktum terdiri atas keputusan pasti yang memuat hak-

hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

- d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat Keputusan umumnya mengandung ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat merupakan substansi yang diputuskan dalam suatu izin.
- e. Pemberian alasan Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus sesuai dengan kondisi objektif dari pariwisata atau fakta serta subjek hukum.
- f. Pemberitahuan tambahan Berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan yang akan dikeluarkan dan lain-lain.

Hal-hal penting dalam perizinan, antara lain adalah :

- a. Penolakan izin dapat dilakukan jika berkaitan dengan masalah pembangunan yang menyangkut kepentingan negara, lingkungan hidup, pertahanan keamanan, ideologi dan lain-lain. Masalah kompetisi tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak izin.
- b. Beberapa izin khusus dimungkinkan untuk dipindah tangankan.
- c. Adanya pembebasan bersyarat yang memiliki ukuran untuk pengambilan keputusan atas suatu izin.
- d. Perumusan izin harus jelas sesuai tujuan dari izin.
- e. Dalam hal izin lingkungan hidup, dapat ditetapkan persyaratan perlindungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

- f. Izin harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Izin dapat dicabut secara menyeluruh atau sebagian, jika suatu kegiatan yang diizinkan berdampak negatif terhadap lingkungan dan tidak cukup hanya dicegah dengan ketentuan atau penambahan persyaratan baru.
- g. Kegiatan usaha musnah oleh sebab tertentu.
- h. Pembatasan dari segi jangka waktu berlakunya suatu izin (pemohon tidak melakukan perjangsan).²³

B. Tinjauan Umum Tentang Memproduksi, Mengedarkan dan Menjual

1. Pengertian Memproduksi

Memproduksi adalah setiap kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.²⁴

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 angka 5 Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015, "memproduksi minuman beralkohol adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk minuman beralkohol".²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Dikutip dari skripsi Muh. Maswar Br, 2014, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Produsen Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Enrekang*. <http://repository.unhas.ac.id>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018

²⁵ Dikutip dari Peraturan Daerah Pasal 1 angka 5, 6 dan 8 Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018

Berdasarkan standar mutu produksi minuman beralkohol, minuman beralkohol dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 0 % sampai dengan 5 % ;
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 5 % sampai dengan 20 %; dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20 % sampai dengan 55 % .²⁶

2. Pengertian Mengedarkan

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 angka 5, 6 dan 8 Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015, “mengedarkan merupakan proses menyalurkan hasil produksi kepada distributor untuk di perdagangkan dan di konsumsi oleh masyarakat. Mengedarkan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri”.²⁷

3. Pengertian Menjual

Menjual merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Menjual juga berarti

²⁶ Bersumber dari Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014. Diakses tanggal 28 Oktober 2018

²⁷ *Op.cit.*

proses dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen(pembeli).²⁸

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 angka 5, 6 dan 8 Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015, “menjual minuman beralkohol adalah kegiatan atau proses menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang ditentukan”.²⁹

Kegiatan menjual merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan menjual merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan menjual sama seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat.

Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian.

Adapun tujuan umum menjual dalam perusahaan yaitu :

- a. Tujuan yang dirancang untuk meningkatkan volume penjualan total atau meningkatkan penjualan produk- produk yang lebih menguntungkan.³⁰

²⁸ M. Nafarin, Penganggaran Perusahaan,(Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 166

²⁹ *Op.cit.*

³⁰ Fandy Tjiptono dkk,Pemasaran startegi, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2008), hal 604. Di akses tanggal 28 Oktober 2018

- b. Tujuan yang dirancang untuk mempertahankan posisi penjualan yang efektif melalui kunjungan penjualan reguler dalam rangka menyediakan informasi mengenai produk baru.
- c. Menunjang pertumbuhan perusahaan

Tujuan tersebut dapat tercapai apabila dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam kegiatan menjual tidak selalu berjalan mulus, keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan banyak dipengaruhi oleh lingkungan pemasaran. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol Tradisional

1. Pengertian Minuman Beralkohol Tradisional

Minuman beralkohol tradisional adalah minuman yang proses pembuatannya melalui fermentasi dan diminum dapat memabukkan dan menurunkan kesadaran bagi yang meminumnya. Minuman beralkohol adalah barang yang bersifat cair yang diminum yang dapat memabukkan atau menurunkan kesadaran bagi seseorang yang meminumnya. Untuk menghindari terjadinya kesalah penafsiran terhadap pengertian dari minuman beralkohol, maka pengertian minuman beralkohol dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menyebutkan : “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol

yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi". Alkohol secara umum dapat diartikan sebagai senyawa kimiawi yang sifatnya dapat memabukkan. Senyawa kimiawi zat alkohol yang mengandung etanol atau etil alkohol adalah persenyawaan yang dalam simbol kimianya disebut C_2H_5OH (etanol), yang bentuknya berupa cairan jernih, cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar, serta melebur bersama air dan eter. Zat yang mengandung etanol tersebut dibuat melalui proses peragian dari berbagai macam karbohidrat.

Minuman beralkohol berdasarkan pembuatannya, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

a. Minuman keras hasil fermentasi

Fermentasi yang dalam Bahasa Indonesia berarti peragian, yang memiliki arti yaitu suatu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol dan CO_2 (karbon dioksida) dengan bantuan ragi. Contoh minuman beralkohol yang berdasarkan proses peragian adalah beer dan juga wine.

b. Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan

Proses destilasi dan penyulingan ini merupakan suatu proses pemanasan dan pendinginan kembali dari minuman tersebut, yang dimaksudkan untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi. Contoh minuman yang berasal dari proses destilasi atau penyulingan adalah sumbernya yang berasal dari biji-bijian dapat

menjadi wiski/whiskies, yang sumbernya berasal dari buah-buahan contohnya brandy, yang sumbernya berasal dari air tebu seperti rum, dan lainnya.

2. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol

Adapun yang termasuk dalam jenis-jenis minuman beralkohol tradisional adalah *tuak*, *moke*, dan *penaraci* (peci). Minuman, *moke* dan *penaraci* merupakan jenis minuman yang sama, perbedaannya hanya pada proses memproduksinya. Minuman *tuak*, *moke* dan *penaraci* merupakan sejenis minuman beralkohol, apabila di konsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan mabuk. Minuman beralkohol ini tidak melalui uji laboratorium sehingga tidak bisa diketahui pasti kadar alkoholnya, juga tentunya ada kandungan lainnya yang belum bisa dipastikan manfaatnya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang termasuk kategori minuman beralkohol golongan A yaitu: *shandy*, minuman ringan beralkohol, *bir/ beer, larger, ale*, bir hitam/*stout, low alcohol wine*, minuman beralkohol berkarbonasi, dan anggur brem bali. Minuman beralkohol golongan B yaitu: *Reduced alcohol wine*, anggur/*wine*, minuman fermentasi pancar/*sparkling wine/champagne, carbonated wine, koktail anggur/wine cocktail*, anggur tonikum

kinina/*quinine tonic wine, meat wine* atau *beef wine, malt wine, fruit wine, sake/rice wine, vegetable wine, honey wine*, tuak/*toddy*, anggur brem bali, minuman beralkohol beraroma, beras kencur dan anggur ginseng. Sedangkan minuman beralkohol golongan C yaitu: *wine cocktail, brandy, fruit brandy, wiski/whiskies, rum, gin, vodka, arak, cognac, tequila* dan *aperitif*.

Minuman beralkohol dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 0 % sampai dengan 5 % ;
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 5 % sampai dengan 20 %; dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20 % sampai dengan 55 % .³¹

³¹*Op.cit.*